

TESIS
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S2)
Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Oleh :
ANDIN AKHMAD MUHAJIMIN
2120419310018

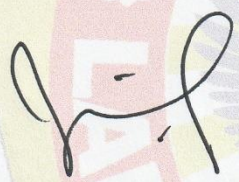
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK
BANJARMASIN
2025

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas
Nama : Andin Akhmad Muhaimin
NIM : 2120419310018
Program Studi : Magister Administrasi Publik

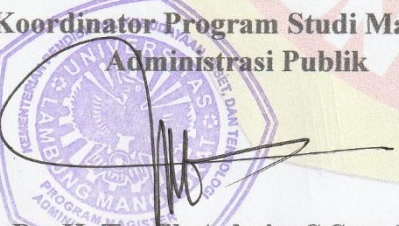
Disetujui Komisi Penguji


Dr. H. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si
Ketua


Dr. H. M. Nur Iman Ridwan, S.Sos., M.Si
Anggota


Drs. H. Setia Budhi, M.Si., Ph. D
Anggota

Mengetahui,


Koordinator Program Studi Magister
Administrasi Publik

Dr. H. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si
NIP. 19740307200212 1 003


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. H. Budi Suryadi, M.Si
NIP. 19730122199802 1 001

Tahun Lulus: 2025

Tanggal Wisuda:

ABSTRAK

Andin Akhmad, 2120419310018, 2025, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. dibawah bimbingan Dr. H. Taufik Arbain, M.Si selaku pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta menganalisis hubungan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan implementasi di lapangan, terutama terkait akses layanan pendidikan, koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap instansi pemerintah terkait serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan koordinasi antarinstansi, belum meratanya layanan pendidikan inklusif, keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi kebijakan, serta belum optimalnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Hubungan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial telah berjalan melalui berbagai bentuk komunikasi dan kerja sama, tetapi masih memerlukan penguatan mekanisme koordinasi, integrasi data, dan sinkronisasi program agar pelayanan kepada penyandang disabilitas dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara inklusif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Andin Akhmad, 2120419310018, 2025, Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2022 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, under the supervision of Dr. H. Taufik Arbain, M.Si as supervisor.

Keywords: policy evaluation, persons with disabilities, protection of rights, local government, cross-sectoral coordination

This study aims to evaluate the implementation of Banjarmasin City Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, as well as to analyze the coordination relationship between the Education Office and the Social Affairs Office in the provision of educational services for persons with disabilities in Banjarmasin City. The research is motivated by the continued gap between normative provisions in the regional regulation and their implementation in the field, particularly regarding access to educational services, cross-sectoral coordination, and the comprehensive fulfillment of the rights of persons with disabilities. This study employs a qualitative approach using an evaluative descriptive method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving relevant government agencies and parties associated with the implementation of the policy. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing in an interactive manner.

The results of the study show that the implementation of Banjarmasin City Regional Regulation Number 3 of 2022 has provided a legal basis for the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities; however, its implementation has not been optimal. The main obstacles include limited inter-agency coordination, uneven distribution of inclusive educational services, limited resources, minimal policy dissemination, and suboptimal support from families and the community toward persons with disabilities. The coordination relationship between the Education Office and the Social Affairs Office has been running through various forms of communication and cooperation, but the coordination mechanism, data integration, and program synchronization still need to be strengthened so that services for persons with disabilities can be carried out effectively and sustainably.

This study concludes that the success of the implementation of Banjarmasin City Regional Regulation Number 3 of 2022 greatly depends on local government commitment, cross-sectoral coordination, resource availability, and active community participation in realizing the fulfillment of the rights of persons with disabilities in an inclusive and equitable manner.

Banjarmasin, Agustus 31, 2026
Kepala



Dr. Hj. Noor Eka Chandra, M.Pd
NIP. 197710232001122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
UPA BAHASA ULM

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 70123 Banjarmasin
Telepon/Fax.: (0511) 3308140 Email: uptbahasa@ulm.ac.id

SURAT KETERANGAN

NO: 110/UN8.16/BS/2026

Bersama ini kami menerangkan bahwa Ringkasan bahasa Inggris dari judul Thesis:
"IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2022 ON THE PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES" yang di susun oleh :

Nama Mahasiswa : Andin Akhmad Muhaimin
Nim : 2120419310018
Jurusan/Fakultas : S2 Administrasi Publik
Program : Pascasarjana

telah diverifikasi bahasa Inggris yang digunakan sesuai dengan makna dari ringkasan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut di atas. (Ringkasan terlampir)
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Agustus 31, 2026
Kepala



Dr. Hj. Noor Eka Chandra, M.Pd
NIP. 197710232001122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 089/UN8.4/MAP-PLAG/2026

DIBERIKAN KEPADA :

ANDIN AKHMAD MUHAIMIN

JUDUL TESIS :

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Banjarmasin, 31 Agustus 2026

Koordinator Program Studi,

Dr. H. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si

NIP. 197403072002121003



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
Tabel 1.1	5
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Rentang Usia.....	5
Tabel 1.2.....	13
Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin Tahun 2022	13
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Praktis	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI.....	16
2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Definisi dan Konsep Kebijakan Publik.....	19
2.3 Proses Perumusan Kebijakan Publik	22
2.4 Evaluasi Kebijakan Publik.....	25
2.5 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	37
2.5.1 Definisi Penyandang Disabilitas	37
2.5.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	41

2.5.3 Hak-Hak Penyandang Disabilitas	45
2.5.4 Jumlah Penyandang Disabilitas	49
Tabel 2.5	49
Jumlah Penyandang Disabilitas Per Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2020	49
2.5.5 Tingkat Pendidikan Penyandang Disabilitas	51
2.6 Kerangka Konseptual	53
BAB III	54
METODE PENELITIAN	54
3.1 Desain Penelitian	54
3.2 Subjek Penelitian	54
3.3 Data dan Sumber Data	55
3.4 Instrumen Penelitian	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	56
3.6 Teknik Analisis Data	57
Tabel 3.6: Rancangan Penelitian dan Aspek Metodologis	58
BAB IV	59
GAMBARAN UMUM	59
4.1 Profil Kota Banjarmasin	59
4.1.1 Sejarah Kota Banjarmasin	59
4.1.2 Keadaan Geografis	59
4.1.3 Administratif Pemerintahan	61
4.1.4 Penduduk Kota Banjarmasin	64
Tabel 4.1	64
Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Per Kecamatan Tahun 2021	64
4.2 Dinas Sosial Kota Banjarmasin	66
4.2.1 Visi dan Misi	66
2. Misi	67
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	67
4.2.3 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	68
BAB V	79

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	79
5.1 Hasil Penelitian	79
5.1.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin	79
5.1.1.1 Aspek Pelayanan Pendidikan Pada Penyandang Disabilitas.....	82
5.1.1.2 Aspek Hubungan Koordinasi Antar Sektor	85
5.2 Pembahasan.....	91
5.2.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin	91
5.2.1.1 Aspek Layanan Pendidikan.....	91
5.2.1.2 Aspek Hubungan Antar Sektor (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin).....	103
BAB VI	116
PENUTUP.....	116
6.1 Kesimpulan	116
6.1.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121